

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 pada laporan realisasi APBD.

Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017.
2. Dana Perimbangan (DP) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017.
3. Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran untuk perbaikan penelitian sejenis dimasa yang akan datang;

1. Diharapkan pada penelitian di masa yang akan datang untuk menambah atau mengganti dengan variabel yang lain yang tidak dijadikan variabel dalam penelitian ini seperti belanja pegawai, luas daerah, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.
2. Mengganti rasio kinerja keuangan pemerintah daerah dengan variabel lain seperti rasio efisiensi maupun rasio efektivitas.
3. Menambah sumber informasi mengenai pengungkapan laporan realisasi APBD yang *up to date*.
4. Menambah sampel maupun periode penelitian.
5. Penelitian mengenai pengaruh belanja modal seharusnya dapat menggunakan metode *time lack* karena belanja modal pemerintah daerah belum maksimal untuk diukur dalam satu periode akuntansi.

C. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Jumlah kabupaten/kota di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini sedikit, sehingga subjek penelitian ini juga sedikit.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang artinya sudah ada sebelumnya dan tidak bisa dikembangkan menjadi lebih kompleks.

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas merujuk pada laporan realisasi APBD yang menggunakan format Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
4. Pengukuran variabel Y, yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah hanya menggunakan rasio kemandirian daerah atau rasio desentralisasi fiskal.
5. Data yang diperoleh dari situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan bukanlah merupakan data fisik sehingga informasi-informasi terkait APBD dirasa masih kurang.

